

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adhari, Ade. *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana*. Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020).
- Alfitra. *Efektifitas Restorative justice dalam Proses Hukum Pidana*. Cetakan ke-1. (Purwosari: WADE GROUP, 2023).
- Amrani, Hanafi. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Cetakan ke-1. (Yogyakarta, UII Press, 2019).
- Assegaf, Rifqi S. *Rekomendasi terkait Pengaturan Pedoman Pemidanaan dalam RKUHP*. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).
- Boone, Miranda et al. *Current Uses of Electronic Monitoring in Netherlands*. (Utrecht: Utrecht University, 2016).
- Dominey, Jane et al. *Remote Supervision: Getting the Balance Right*. (Cambridge: Institute of Criminology University of Cambridge, 2020).
- Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*. Cetakan ke-1. (Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020).
- Firmansyah. *Sanksi & Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif KUHP Terbaru*. Cetakan ke-1. (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024).
- Harwanto, Edi Ribut. *Keadilan Restorative justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*. Cetakan ke-1. (Penerbit Laduny: Lampung, 2021).
- Hiariej, Eddy O.S Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Cetakan ke-2. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017).
- Ishaq, H. *Hukum Pidana*. Cetakan ke-2. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Cetakan ke-15. (Jakarta: Kencana, 2021).
- Maya, Genoveva Alicia K.S. et al. *Alternatives to Imprisonment: Provision, Implementation, and Projection of Alternatives to Imprisonment in Indonesia*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2019).

- Mudzakkir et al. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*. (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008).
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Cetakan ke-5. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Cetakan ke-10. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019).
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Bandung: Sinar Baru, 2021).
- Rohman, Moh Mujibur et al. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan ke-1. (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023).
- Sibarani, Sabungan dan Widiyanto Poelsoko. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Cetakan ke-1. (Jakarta: PT Actual Potensia Mandiri, 2019).
- Simanjuntak, Jean Calvijn. *Restorative justice: Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*. Cetakan ke-1. (Depok: Rajawali Pers, 2023).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan ke-16. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019).
- Sriwidodo, Joko. *Politik Hukum Pidana dalam Pendekatan UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP*. Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2023).
- Syahrin, Alvi et al. *Dasar-dasar Hukum Pidana Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Cetakan ke-1. (Medan: Merdeka Kreasi, 2023).
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Introductory Handbook on The Prevention of Recidivism and The Social Reintegration of Offenders*. (Vienna: Publishing and Library Section, 2018).
- Utama, Andrew Shandy et al. *Problematika Penegakan Hukum*. Cetakan ke-1. (Solok: Penerbit Insan Cendekia Mandiri, 2021).
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan ke-1. (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017).

- Weriansyah, Aditya et al. *Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IIRS), 2021).
- Yoserwan. *Doktrin Ultimum remedium dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi)*. Cetakan ke-1. (Padang: Andalas University Press, 2019).

Jurnal

- Abdurrachman, Hamidah et al. "Application of *Ultimum remedium* Principles in Progressive Law Perspective". *International Journal of Criminology and Sociology*. Vol. 10 (2021).
- Ali, Mahrus. "Overcriminalization dalam Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 25 No. 3 (2018).
- _____. "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol. 25 No. 1 (2018).
- Ali, Tengku Mabrar et al. "Forgiving of The Victim and/or Family Towards The Perpetrator as a Consideration in Imposing Criminal and Punishment According to The Law Number 1 of 2023 concerning The Criminal Code". *Jurnal Rectum*. Vol. 5 No. 1 (2023).
- Aryaputra, Muhammad Iftar et al. "Kebijakan Aplikatif Penjatuan Pidana Denda Pasca Keluarnya Perma No. 2 Tahun 2012". *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. Vol. 19 No. 1 (2017).
- Belur, Jyoti et al. "A Systematic Review of the Effectiveness of the Electronic Monitoring of Offenders". *Journal of Criminal Justice*. Vol. 68 No. 1.
- Fitri, Sheila Maulida. "Eksistensi Penerapan *Ultimum remedium* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal de Jure; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 2 No.1 (2020).
- Ginting, Yuni Priskila. "Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas *Ultimum remedium*". *The Prosecutor Law Review*. Vol. 2 No. 1 (2024).

- Hanata, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 7. No. 1 (2018).
- Isnawati, Muridah dan Prasista Maolana. "Paradigm of Shifting Imprisonment to Non-Imprisonment in Indonesia Crimination". *Proceedings of the 1st UMSurabaya Multidisciplinary International Conference* (2021).
- Kaongo, Adul Halim. "Pengawasan Vonis Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pemidanaan". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 13 No. 3.
- Naibaho, Nathalina. "Rethinking the *Ultimum remedium* Principle to Support Justice and Strong Law Enforcement Institutions in Environmental Crimes". *The 1st Journal of Environmental Science and Sustainable Development Symposium*. Vol. 716 (2021).
- Nggeboe, Ferdricka. "Suatu Tinjauan tentang Pidana Denda dalam Hukum Pidana Positif Indonesia dan Rancangan KUHP". *Jurnal Legalitas*. Vol. 11 No. 1 (2012).
- Nusa, Nuryanto D. et al. "Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat dalam Mencapai Tujuan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Marisa)". *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. Vol. 1 No. 2.
- Pramesti, Nyoman Widia Septiani dan Diah Ratna Sari Hariyanto. "Upaya Perlindungan Hak Bagi Narapidana Kelompok Rentan Kategori Anak". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 17 No. 7 (2023).
- Ramadhan, Muhammad dan Dwi Oktafia Ariyanti. "Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 5 No.1 (2023).
- Rivanie, Syarif Saddam et al. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan". *Jurnal Halu Oleo Law Review*. Vol. 6. No. 2 (2022).
- Roberts, Julian V. et al. "Individualisation at Sentencing: The Effects of Guidelines and 'Preferred' Numbers". *Criminal Law Review Journal*. No. 2 (2018).

- Setiadi, Wicipto. “Penegakan Hukum: Kontribusinya bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia”. *Majalah Hukum Nasional*. Vol. 48. No. 2 (2018).
- Sitinjak, Darwin Jeremia dan Sagung Putri M. E. Purwani. “Eksistensi *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 11 No. 11 (2023).
- Subroto, Mitro dan Muhammad Dhea Setiawan. “Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Lanjut Usia pada Lembaga Pemasyarakatan”. *INNOVATIVE: Journal of Science Research*. Vol. 4 No. 5 (2024).
- Sujatmiko, Bagus dan Milda Istiqomah. “Mendorong Penerapan Pidana Bersyarat Pasca Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Sebagai Alternatif Keadilan Restoratif”. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 7 No. 1 (2022).
- Sulistiani, Lies dan Efa Laela Fakhriah. “The Effect of Extra Judicial Settlement in Criminal Cases Based on the Principle of *Ultimum remedium*”. *Padjajaran Journal of Law*, Vol. 10 No.3 (2023).
- Susilowati, Christina Maya Indah. “The Philosophy of Sentencing in Indonesia Based on Dignified Justice”. *International Journal of Business, Economic and Law*. Vol. 22 No. 1 (2020).

Peraturan perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- _____. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
- _____. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- _____. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

- _____. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
- _____. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- _____. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- _____. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- _____. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).
- _____. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).
- _____. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811).
- _____. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947).
- _____. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241).

Sumber internet

- Annisa. “Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor, dan Tahapnya”.
<https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>. Diakses pada 29 Juli 2024.
- Atammimi, Nadhir. “Guru Supriyani Dituntut Bebas di Kasus Penganiayaan Siswa”. <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7632936/guru-supriyani-dituntut-bebas-di-kasus-penganiayaan-siswa/amp>. Diakses pada 12 November 2024.
- Baca, Jeannette. “Breaking Barriers to Accessible Virtual Social Work Supervision”.
<https://www.google.com/amp/s/www.socialworker.com/api/amp/feature-articles/practice/breaking-barriers-accessible-virtual-social-work-supervision/>. Diakses pada 3 Desember 2024.
- Bapas Pontianak. “Kemampuan Komunikasi Dan Mitigasi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Era Baru Peradilan Pidana”.
<https://bapaspontianak.com/kemampuan-komunikasi-dan-mitigasi-pembimbing-kemasyarakatan-dalam-era-baru-peradilan-pidana/>. Diakses pada 18 November 2024.
- Ditjenpas. “Uniknya Kafe Kapal Janji Bui Lapas Waikabubak”.
<https://www.ditjenpas.go.id/uniknya-kafe-kapal-janji-bui-lapas-waikabubak>. Diakses pada 30 November 2024.
- Festy, Noer. “CHA Sudharmawatiningsih: Keyakinan Hakim Harus Dibangun dari Dua Alat Bukti yang Sah”.
https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15489/cha-sudharmawatiningsih-keyakinan-hakim-harus-dibangun-dari-dua-alat-bukti-yang-sah. Diakses pada 3 Oktober 2024.
- Heriani, Fitri Novia. “Peluang dan Tantangan Advokat dalam Penerapan KUHP Baru”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/peluang-dan-tantangan-advokat-dalam-penerapan-kuhp-baru-lt670c45c752132/?page=2>. Diakses pada 25 November 2024.

Indonesia Judicial Research Society (IJRS). “Kesejahteraan Hakim di Era Transisi Pemerintahan: Gimik atau Sistemik?”.
<https://ijrs.or.id/2024/10/11/kesejahteraan-hakim-di-era-transisi-pemerintahan-gimik-atau-sistemik/>. Diakses pada 23 November 2024.

Institute of Criminal Justice Reform. “The Distribution and Framing of the Punishments in the Bill of Penal Code is Still Vague, Aliansi RKUHP Renounces a Hurried Adoption of the Bill”. <https://icjr.or.id/the-distribution-and-framing-of-the-punishments-in-the-bill-of-penal-code-is-still-vague-aliansi-rkuhp-renounces-a-hurried-adoption-of-the-bill/>. Diakses pada 5 Desember 2024.

Jayanti, Dian Dwi. “Kelalaian yang Merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d/>. Diakses pada 24 September 2024.

Kadafi. “Kasus Pelihara Landak Jawa, JPU Tuntut Bebas Sukea di PN Denpasar”. <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20240913150944-12-1144220/kasus-pelihara-landak-jawa-jpu-tuntut-bebas-sukea-di-pn-denpasar/amp>. Diakses pada 2 Oktober 2024.

Mahkamah Agung. “Tahun 2023 Merupakan Rekor dengan Jumlah Sisa Perkara Terendah dalam Sejarah Berdirinya Mahkamah Agung”. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/6175/tahun-2023-merupakan-rekor-dengan-jumlah-sisa-perkara-terendah-dalam-sejarah-berdirinya-mahkamah-agung#:~:text=Beban%20perkara%20pada%20Mahkamah%20Agung,perkara%20tahun2022%20sebanyak%20260%20perkara>. Diakses pada 23 November 2024.

Mardatillah, Aida. “Menelusuri Perbedaan Pidana Denda dalam KUHP Lama dan Baru”.
<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt651170fb33a90/menelusuri-perbedaan-pidana-denda-dalam-kuhp-lama-dan-baru/>. Diakses pada 25 Juli 2024.

Masruroh. “Ibu di Sumenep Antar Anaknya untuk Diperkosa Kepsek, Komnas PA: Hukum

Seberatnya”.<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/beritaan-aksurabaya/ibu-di-sumenep-antar-anaknya-untuk-diperkosa-kepsek-komnas-pa-hukum-seberatnya-23Rz0MJl5VW>. Diakses pada 12 November 2024.

Moeliono, Tristam Pascal dan Nefa Claudia Meliala. “Pertimbangan Hakim Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan dalam Putusan”.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pertimbangan-hakim-terkait-hal-yang-memberatkan-dan-meringankan-dalam-putusan-lt6148587b30090/?page=2>. Diakses pada 3 Oktober 2024.

Nursobah, Asep. “Ketua MA Lantik 3 Hakim Agung, Inilah Formasi Lengkap Hakim Agung Saat Ini”.<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2201-ketua-ma-lantik-3-hakim-agung-inilah-formasi-lengkap-hakim-agung-saat-ini>. Diakses pada 23 November 2024.

Nursobah, Asep. “Pidana Non Pemenjaraan di Belanda Berhasil Menurunkan Tingkat Hunian LP”,<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/seputar-kunjungan-hoge-raad-2023/2220-pidana-non-pemenjaraan-di-belanda-berhasil-menurunkan-tingkat-hunian-lp>. Diakses pada 5 Desember 2024.

Putri, Alia Yassinta Echa. “Penegakan Hukum di Indonesia: Pengertian, Fungsi, dan Contoh Lembaganya”.<https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-6899076/penegakan-hukum-di-indonesia-pengertian-fungsi-dan-contoh-lembaganya/amp>. Diakses pada 29 Juli 2024.

Sudirdja, Rudi Pradisetia. “Jaksa dan Implementasi Pidana Pengawasan di KUHP Baru”.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-dan-implementasi-pidana-pengawasan-di-kuhp-baru-lt65c284ef91efc/?page=3>. Diakses pada 25 November 2024.

Syarifudin, Taufiq. “Pemerintah Keluarkan Modul Penerapan Pidana Bersyarat KUHP”. <https://news.detik.com/berita/d-7376055/pemerintah-keluarkan-modul-penerapan-pidana-bersyarat-kuhp>. Diakses pada 13 November 2024.

Widi, Shilvina. “Overkapasitas Lapas RI Capai 89,35% hingga akhir Maret 2023”. <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023>. Diakses pada 26 Juli 2024.

Yasin, Muhammad. “11 Hal yang Wajib Dipertimbangkan Hakim dalam Pemidanaan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/11-hal-yang-wajib-dipertimbangkan-hakim-dalam-pemidanaan-lt616510607b4d4/?page=2>. Diakses pada 2 Oktober 2024.